

## SINOPSIS

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Pembinaan Usaha kecil dan Menengah Tahun 2004-2006". Latar belakang masalah adalah karena berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah mencanangkan Tahun 2004 sebagai tahun Keuangan Mikro yang intinya untuk memperkuat perekonomian rakyat. Pemerintah telah sepakat memprioritaskan bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan begitu bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan khususnya Dinas Koperasi dan UKM adalah mempunyai peran yang cukup baik dan penyampaian materi pembinaan kepada pelaku usaha (UKM) tepat guna, sesuai dengan permasalahan yang timbul dalam anggota UKM itu sendiri dan untuk mensukseskan pencanangan Tahun 2004 sebagai tahun keuangan makro. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : "Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Kuningan Dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kuningan Jawa barat Tahun 2004-2006?"

Jenis penelitian adalah Deskriptif Kualitatif, yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan. Objek penelitian mencakup Bapeda, Dinas Koperasi dan UKM khususnya Kasi dan tim pelaksana manajemen dan Kewirausahaan UKM. Observasi dilakukan pada anggota UKM khususnya penghasil produk makanan, Kelompok UKM Desa jalaksana.

Dari hasil penelitian menunjukkan hasil usaha dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini di tangani oleh Dinas Koperasi dan UKM. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan telah memberikan manfaat dan keuntungan bagi para anggota UKM. Pemerintah juga berperan dalam perumusan kebijakan teknis bidang usaha kecil dan menengah. Berperan sebagai pelaksana bimbingan teknis pembinaan UKM. Berperan sebagai fasilitator permohonan bantuan modal usaha bagi anggota UKM, dan terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam anggota UKM. Permasalah tersebut yaitu, Sumberdaya Manusia pelaku usaha relative rendah dan terbatas, permodalan yang ada relative terbatas dan modal sendiri serta lembaga Perbankan belum optimal, pemasaran masih tersendat-sendat, Belum melaksanakan administrasi keuangan usaha yang baik.

Saran yang diajukan adalah agar Pemerintah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya pelaku usaha untuk lebih berkualitas lagi, dengan cara meningkatkan mutu pendidikan masyarakat secara luas dan mensosialisasikan wajib belajar serendah-rendahnya tamat SLTA. Pemerintah mengoptimalkan lagi bantuan permodalan baik modal yang berasal dari kekayaan daerah/pendapatan asli daerah maupun bantuan dari lembaga Perbankan agar di optimalkan lagi. Pemerintah lebih mengoptimalkan pembinaan di bidang manajemen pemasaran yang baik karena...